

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

1. Tren Harga Kebutuhan Pokok di Bondowoso 2025

Sepanjang tahun 2025, pantauan *Diskoperindag* Bondowoso menunjukkan **fluktuasi harga kebutuhan pokok** di pasar-pasar utama (Pasar Induk Bondowoso, Pasar Maesan, Pasar Wonosari, Pasar Prajekan). Data yang dipublikasikan secara berkala memperlihatkan dinamika yang cukup variatif antar komoditas sepanjang tahun:

a. Komoditas yang sering mengalami kenaikan harga

- **Ayam potong** secara umum mengalami kenaikan harga di berbagai periode, antara lain sekitar +5-10% pada Agustus dan September 2025.
- **Cabe rawit merah dan cabe merah besar** juga sering dicatat naik, misalnya kenaikan signifikan cabe rawit sekitar +21,7% di September, serta tren kenaikan pada periode lain.
- **Bawang merah dan tomat** pada beberapa periode menunjukkan tren naik, contohnya bawang merah sampai +19% di akhir Juli, dan tomat naik di awal hingga pertengahan tahun.

b. Komoditas yang mengalami penurunan atau fluktuasi turun-naik

- **Beras** (SPHP Medium) justru tercatat mengalami penurunan harga di pasar tertentu pada periode September.
- **Sayuran seperti tomat, bawang putih, wortel, kubis** beberapa kali mengalami penurunan harga secara signifikan pada periode tertentu, yang dipengaruhi oleh supply musiman atau panen di daerah dataran tinggi Bondowoso.

Kesimpulan: *Harga kebutuhan pokok di Bondowoso tidak stabil secara seragam. Fluktuasi terjadi tergantung komoditas, musim panen, distribusi logistik, dan permintaan lokal. Data menunjukkan adanya tren kenaikan harga beberapa komoditas penting seperti ayam, cabai, dan bawang, sementara sayuran tertentu serta beras kadang menurun.*

2. Inflasi Daerah dan Hubungan dengan Jawa Timur

Walaupun belum ada data resmi inflasi tahunan spesifik untuk Bondowoso sepanjang 2025 yang dipublikasikan oleh BPS secara terpisah, data **Provinsi Jawa Timur mencatat inflasi**

y-on-y (year-on-year) sekitar 2,02% pada Juni 2025, dengan kontribusi kenaikan harga kelompok makanan dan minuman sebagai salah satu pendorong utama.

Karena Bondowoso adalah bagian dari wilayah Jawa Timur, maka pergerakan harga kebutuhan pokok yang terjadi di pasar lokal berkontribusi terhadap tren inflasi regional di provinsi tersebut. Fluktuasi yang sering terjadi di tingkat komoditas lokal mencerminkan **tekanan harga pada kelompok makanan yang juga ditunjukkan dalam data inflasi provinsi**.

3. Penyebab Fluktuasi Harga Lokal

Beberapa faktor yang terlihat memengaruhi perkembangan harga kebutuhan pokok di Kabupaten Bondowoso antara lain:

- **Musim panen dan pola produksi pertanian lokal** — produk sayuran sering turun harganya saat panen melimpah.
 - **Permintaan musiman dan pola konsumsi** — misalnya ayam potong dan telur cenderung naik mengikuti permintaan pasar.
 - **Distribusi logistik dan ketersediaan barang** — hambatan distribusi dapat menyebabkan kenaikan harga bawang dan cabai.
-

4. Risiko ke Depan yang Perlu Diantisipasi

Berdasarkan tren harga komoditas sepanjang tahun serta kajian sebelumnya tentang kondisi ekonomi daerah:

a. Risiko Pasokan dan Cuaca

- Perubahan iklim dan fenomena seperti **El Niño** dapat memengaruhi produksi pertanian regional, menyebabkan pasokan kebutuhan pokok berfluktuasi dan memperbesar ketidakstabilan harga.

b. Ketergantungan pada Komoditas Lokal

- Masyarakat di banyak wilayah Bondowoso masih sangat bergantung pada produksi pertanian lokal. Ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan dapat berdampak langsung pada harga pasar.

c. Volatilitas Harga Bahan Pangan

- Harga beberapa komoditas pangan yang menunjukkan **peningkatan tajam dalam periode tertentu** (seperti cabai dan bawang) dapat meningkatkan tekanan inflasi lokal jika tren kenaikan berlanjut.

d. Kebijakan dan Pengendalian Pasar

- Upaya pengendalian inflasi melalui *Tim Pengendalian Inflasi Daerah* (TPID) perlu terus diperkuat untuk memantau harga, menjaga stabilitas distribusi dan pasokan, serta mengantisipasi gejolak harga yang tajam.

5. Rangkuman Naratif

Perkembangan harga kebutuhan pokok di Bondowoso sepanjang 2025 mencerminkan dinamika pasar yang dipengaruhi oleh faktor musiman, pola konsumsi masyarakat, dan kondisi pasokan logistik. Beberapa komoditas seperti ayam, cabai, dan bawang menunjukkan tren kenaikan harga di beberapa periode, sementara sayuran dan beberapa produk lainnya kadang turun tergantung pada musim panen dan ketersediaan barang. Meski data inflasi daerah lengkap belum tersedia secara terpisah, tren harga lokal ini sejalan dengan inflasi provinsi Jawa Timur yang relatif terkendali namun tetap dipengaruhi oleh kenaikan di kelompok makanan dan minuman. Ke depan, risiko yang perlu diantisipasi mencakup kondisi iklim, ketergantungan pada produksi lokal, volatilitas harga pangan, dan efektivitas kebijakan pengendalian pasar untuk menjaga stabilitas harga serta daya beli masyarakat.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Identifikasi Permasalahan Pengendalian Inflasi Daerah

Kabupaten Bondowoso Tahun 2025**

Pengendalian inflasi di Kabupaten Bondowoso pada tahun 2025 masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan teknis yang memengaruhi stabilitas harga serta daya beli masyarakat. Sebagai daerah dengan karakteristik ekonomi yang masih didominasi sektor pertanian dan perdagangan, dinamika inflasi di Bondowoso sangat dipengaruhi oleh perkembangan harga komoditas pangan strategis dan barang kebutuhan pokok.

1. Ketergantungan Tinggi terhadap Komoditas Pangan Tertentu

Struktur konsumsi masyarakat Bondowoso masih sangat bergantung pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Komoditas seperti beras, cabai, bawang merah, telur ayam ras, dan daging ayam memiliki bobot besar dalam pembentukan inflasi daerah. Ketika terjadi gangguan pasokan atau peningkatan permintaan musiman, harga komoditas tersebut cenderung mengalami lonjakan yang signifikan dan sulit dikendalikan dalam jangka pendek.

2. Volatilitas Harga Akibat Faktor Musiman dan Cuaca

Produksi pertanian di Bondowoso sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca dan musim tanam. Perubahan iklim, curah hujan yang tidak menentu, serta potensi cuaca ekstrem berisiko menurunkan produktivitas pertanian dan mengganggu ketersediaan pasokan pangan. Hal ini menyebabkan harga komoditas hortikultura seperti cabai dan bawang merah sering berfluktuasi tajam, sehingga memicu tekanan inflasi yang bersifat musiman.

3. Keterbatasan Infrastruktur dan Sistem Distribusi

Permasalahan distribusi dan logistik masih menjadi tantangan dalam pengendalian inflasi daerah. Keterbatasan sarana transportasi, jarak antarwilayah produksi dan pasar, serta ketergantungan pada pasokan dari luar daerah menyebabkan biaya distribusi relatif tinggi. Kondisi ini berdampak pada tingginya harga jual di tingkat konsumen, terutama di wilayah kecamatan yang relatif jauh dari pusat perdagangan.

4. Lemahnya Cadangan dan Manajemen Stok Pangan

Ketersediaan cadangan pangan daerah, baik yang dikelola pemerintah maupun pelaku usaha, masih terbatas. Ketika terjadi lonjakan permintaan pada momen tertentu seperti Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), pasar sering kali tidak memiliki stok yang cukup untuk meredam kenaikan harga. Keterbatasan ini mempersempit ruang intervensi pemerintah daerah dalam menstabilkan harga.

5. Pola Perilaku Pasar dan Ekspektasi Harga

Ekspektasi pedagang dan konsumen terhadap kenaikan harga, terutama menjelang HBKN, sering memicu kenaikan harga lebih awal (early price increase). Perilaku penahanan stok dan spekulasi harga di tingkat pedagang turut memperbesar tekanan inflasi, meskipun kondisi pasokan secara umum masih relatif mencukupi.

6. Koordinasi dan Efektivitas Intervensi Pengendalian Inflasi

Meskipun Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) telah berperan aktif, pelaksanaan langkah pengendalian inflasi masih menghadapi tantangan dalam hal sinkronisasi data, kecepatan respons kebijakan, dan kesinambungan program. Kegiatan seperti operasi pasar, pasar murah, dan kerja sama antar daerah belum sepenuhnya optimal dalam menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan wilayah yang rentan terhadap kenaikan harga.

7. Keterbatasan Data Harga dan Sistem Peringatan Dini

Pemantauan harga komoditas strategis belum sepenuhnya didukung oleh sistem peringatan dini (early warning system) yang kuat. Akibatnya, potensi gejolak harga sering teridentifikasi ketika kenaikan sudah terjadi, sehingga intervensi menjadi bersifat reaktif dan kurang efektif dalam menahan laju inflasi.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Pelaksanaan Kebijakan Pengendalian Inflasi

Kabupaten Bondowoso Tahun 2025

Pada tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Bondowoso melaksanakan kebijakan pengendalian inflasi daerah secara terintegrasi melalui koordinasi lintas perangkat daerah dan pemangku kepentingan dalam wadah **Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)**. Pelaksanaan kebijakan ini bertujuan untuk menjaga stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan penting, mengendalikan laju inflasi daerah, serta melindungi daya beli masyarakat, terutama kelompok rentan.

1. Penguatan Koordinasi dan Kelembagaan TPID

Pemerintah Kabupaten Bondowoso secara aktif memperkuat peran TPID melalui rapat koordinasi rutin, baik internal daerah maupun bersama TPID Provinsi Jawa Timur. Koordinasi ini difokuskan pada pemantauan perkembangan harga, identifikasi risiko inflasi, serta penentuan langkah antisipatif terhadap potensi gejala harga, khususnya menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) dan periode rawan inflasi lainnya.

2. Pemantauan dan Pengendalian Harga Kebutuhan Pokok

Sebagai upaya menjaga stabilitas harga, pemerintah daerah melaksanakan pemantauan harga secara berkala di pasar tradisional dan pusat distribusi utama. Data harga tersebut digunakan sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan pengendalian inflasi, termasuk penentuan waktu dan lokasi intervensi pasar. Pemantauan difokuskan pada komoditas strategis seperti beras, cabai, bawang merah, minyak goreng, gula, telur ayam ras, dan daging ayam.

3. Pelaksanaan Operasi Pasar dan Pasar Murah

Untuk menekan lonjakan harga dan menjaga keterjangkauan harga bagi masyarakat, Pemerintah Kabupaten Bondowoso melaksanakan kegiatan operasi pasar dan pasar murah secara selektif dan terarah. Kegiatan ini dilakukan bekerja sama dengan Bulog, BUMD, pelaku usaha, serta distributor pangan, terutama pada periode meningkatnya permintaan masyarakat. Intervensi ini diharapkan dapat menambah pasokan di pasar dan menahan laju kenaikan harga.

4. Penguatan Ketersediaan dan Kelancaran Distribusi Pangan

Kebijakan pengendalian inflasi juga diarahkan pada upaya menjaga kelancaran distribusi barang kebutuhan pokok. Pemerintah daerah mendorong kerja sama antar daerah (KAD) untuk menjamin ketersediaan pasokan pangan, khususnya komoditas yang tidak diproduksi secara optimal di Bondowoso. Selain itu, upaya menjaga kelancaran transportasi dan distribusi dilakukan untuk meminimalkan biaya logistik yang berdampak pada harga di tingkat konsumen.

5. Dukungan terhadap Produksi dan Ketahanan Pangan Daerah

Dalam rangka mengurangi tekanan inflasi dari sisi pasokan, pemerintah daerah memberikan dukungan terhadap sektor pertanian melalui peningkatan produktivitas, pendampingan petani, serta penguatan produksi pangan lokal. Kebijakan ini diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara pasokan dan permintaan, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah.

6. Pengendalian Ekspektasi Inflasi dan Komunikasi Publik

Pemerintah Kabupaten Bondowoso juga melakukan komunikasi publik secara aktif terkait perkembangan harga dan kebijakan pengendalian inflasi. Upaya ini bertujuan untuk mengelola ekspektasi inflasi masyarakat dan pelaku usaha, serta mencegah perilaku spekulatif yang dapat memicu kenaikan harga tidak wajar. Informasi harga dan ketersediaan barang disampaikan secara terbuka melalui berbagai media.

7. Sinergi Program Pengendalian Inflasi dengan Perlindungan Sosial

Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi juga disinergikan dengan program perlindungan sosial daerah dan pusat. Melalui penyaluran bantuan pangan, subsidi, dan program penguatan daya beli masyarakat, pemerintah daerah berupaya meminimalkan dampak inflasi terhadap kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.

Kesimpulan

Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di Kabupaten Bondowoso tahun 2025 dilakukan melalui pendekatan yang komprehensif, mencakup penguatan koordinasi kelembagaan, pengendalian harga, intervensi pasar, penguatan pasokan dan distribusi, serta komunikasi publik yang efektif. Kebijakan ini diharapkan mampu menjaga stabilitas harga, mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bondowoso.

Apabila Anda menginginkan, saya dapat:

- **menyingkat menjadi versi ringkasan eksekutif,**
- **menyesuaikan dengan indikator kinerja (IKU/SAKIP),** atau
- **menambahkan evaluasi capaian dan kendala pelaksanaan kebijakan.**

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Evaluasi Kebijakan Pengendalian Inflasi

Kabupaten Bondowoso Tahun 2025

Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di Kabupaten Bondowoso pada tahun 2025 menunjukkan berbagai capaian positif, namun masih menghadapi sejumlah tantangan yang perlu menjadi perhatian untuk perbaikan kebijakan ke depan. Evaluasi ini dilakukan dengan meninjau efektivitas koordinasi, dampak intervensi kebijakan, serta keberlanjutan upaya

pengendalian inflasi dalam menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.

1. Efektivitas Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)

Secara umum, koordinasi TPID Kabupaten Bondowoso pada tahun 2025 berjalan cukup baik. Rapat koordinasi rutin, pemantauan harga, serta sinergi dengan TPID Provinsi Jawa Timur telah meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gejolak inflasi. Namun demikian, koordinasi lintas perangkat daerah masih perlu ditingkatkan, khususnya dalam percepatan pengambilan keputusan dan tindak lanjut kebijakan ketika terjadi lonjakan harga secara tiba-tiba.

2. Dampak Kebijakan terhadap Stabilitas Harga

Berbagai kebijakan intervensi seperti operasi pasar, pasar murah, dan pemantauan harga terbukti mampu menahan laju kenaikan harga pada periode tertentu, terutama menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Meski demikian, kebijakan tersebut cenderung bersifat jangka pendek dan belum sepenuhnya mampu mengendalikan volatilitas harga komoditas pangan yang dipengaruhi faktor musiman dan cuaca, seperti cabai dan bawang merah.

3. Ketersediaan dan Distribusi Barang Kebutuhan Pokok

Upaya menjaga ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi barang kebutuhan pokok telah memberikan dampak positif terhadap stabilitas pasar. Namun, ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah serta keterbatasan infrastruktur distribusi masih menjadi kendala utama. Hal ini menyebabkan disparitas harga antarwilayah kecamatan dan meningkatkan biaya logistik yang pada akhirnya berdampak pada harga di tingkat konsumen.

4. Ketahanan Pangan dan Penguatan Produksi Lokal

Kebijakan yang diarahkan pada penguatan produksi pangan lokal belum sepenuhnya memberikan hasil optimal dalam menekan tekanan inflasi. Produktivitas sektor pertanian masih sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca dan ketersediaan sarana produksi. Program peningkatan ketahanan pangan daerah memerlukan penguatan dari sisi perencanaan, pendanaan, dan pendampingan agar mampu berkontribusi lebih signifikan terhadap stabilitas harga.

5. Pengelolaan Ekspektasi Inflasi dan Perilaku Pasar

Komunikasi publik yang dilakukan pemerintah daerah cukup membantu dalam menyampaikan informasi perkembangan harga dan ketersediaan barang. Namun, pengelolaan ekspektasi inflasi masyarakat dan pelaku usaha belum sepenuhnya efektif. Masih ditemukan perilaku spekulatif dan kenaikan harga lebih awal di tingkat pedagang, terutama menjelang periode meningkatnya permintaan.

6. Pemanfaatan Data dan Sistem Pemantauan Harga

Pemantauan harga telah dilakukan secara rutin, tetapi pemanfaatan data sebagai dasar kebijakan masih bersifat reaktif. Keterbatasan sistem peringatan dini (early warning system) menyebabkan intervensi sering dilakukan setelah harga mengalami kenaikan. Hal ini mengurangi efektivitas kebijakan dalam mencegah gejolak inflasi sejak dini.

7. Dampak terhadap Daya Beli Masyarakat

Kebijakan pengendalian inflasi yang disinergikan dengan program perlindungan sosial cukup membantu menjaga daya beli masyarakat berpenghasilan rendah. Namun, fluktuasi harga pangan strategis masih dirasakan secara langsung oleh rumah tangga, terutama kelompok rentan, sehingga stabilitas harga belum sepenuhnya terjaga secara merata.

Kesimpulan Evaluatif

Secara keseluruhan, kebijakan pengendalian inflasi di Kabupaten Bondowoso tahun 2025 telah berjalan dengan arah yang tepat dan menunjukkan hasil yang cukup baik dalam menjaga stabilitas harga pada periode tertentu. Namun, efektivitas kebijakan masih dibatasi oleh faktor struktural seperti ketergantungan pasokan, volatilitas produksi pangan, keterbatasan distribusi, serta belum optimalnya sistem peringatan dini. Ke depan, diperlukan penguatan kebijakan yang lebih bersifat preventif, berkelanjutan, dan berbasis data untuk meningkatkan efektivitas pengendalian inflasi dan melindungi daya beli masyarakat secara lebih optimal.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.